



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III  
JALAN BUDI UTOMO NO.6 JAKARTA PUSAT 10710  
TELEPON 021-3449230 Intern 5660, 021-3849670 FAKSIMILI 021-3849670  
SITUS [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

Nomor : S- ~~3699~~ /PB.7/2018 23 April 2018  
Sifat : **Sangat Segera**  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara pada KPPN sebagai Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) Periode II Tahun 2018

Yth. 1. Para Kepala Kanwil DJPb se-Indonesia  
2. Para Kepala KPPN se-Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola APBN periode II tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendaftaran sertifikasi bendahara berdasarkan Pengumuman Direktur Sistem Perbendaharaan nomor Peng-5/PB/2018 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode II Tahun 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 sejumlah 833 peserta.
2. Selanjutnya berdasarkan monitoring penyelesaian data peserta sertifikasi bendahara tahun 2018 berdasarkan surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor S-222/PB.7/2018 tanggal 9 Januari 2018 hal Tindak Lanjut Data Peserta Sertifikasi Bendahara Tahun 2017 belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh KPPN selaku Unit Pelaksana Sertifikasi sebagaimana data terlampir (**Lampiran I**).
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka percepatan pelaksanaan sertifikasi bendahara, kiranya perlu disampaikan langkah-langkah strategis terkait pelaksanaan kegiatan sertifikasi kepada KPPN selaku UPS sebagai berikut:
  - a. KPPN selaku UPS segera melakukan tindak lanjut atas data peserta sertifikasi bendahara tahun 2017 yang masih memerlukan perbaikan melalui aplikasi Simserba sebagaimana panduan manual terlampir (**Lampiran II**);
  - b. KPPN selaku UPS segera berkoordinasi dengan satker di wilayah kerjanya untuk segera dapat melakukan pendaftaran sebagai peserta sertifikasi bendahara periode II dan menginformasikan kepada peserta sertifikasi bendahara tahun 2017 yang datanya masih memerlukan perbaikan;
  - c. Hasil tindak lanjut pendaftaran sertifikasi bendahara periode II tahun 2018 dan perbaikan data peserta sertifikasi bendahara tahun 2017 sebagaimana angka 3 huruf b agar dituangkan dalam laporan pengawasan pelaksanaan sertifikasi bendahara satker wilayah kerja KPPN sebagaimana format terlampir (**Lampiran III**);
  - d. Penyampaian laporan pengawasan pelaksanaan sertifikasi bendahara satker wilayah kerja KPPN agar dapat dikirimkan melalui email [spkpp1@gmail.com](mailto:spkpp1@gmail.com) atau [sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id](mailto:sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id) paling lambat tanggal 4 Mei 2018.
4. Selanjutnya, sesuai dengan perbaikan data pada angka 3 dan data calon peserta sertifikasi periode II yang terdaftar, Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai Unit Penyelenggara akan melaksanakan verifikasi, penetapan peserta dan ujian sertifikasi yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Mei 2018. Untuk itu, KPPN selaku UPS agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. KPPN selaku UPS segera berkoordinasi dengan satker di wilayah kerjanya untuk menginformasikan jadwal pelaksanaan ujian sertifikasi sebagaimana jadwal yang telah

ditetapkan...



ditetapkan oleh Unit Penyelenggara (**Lampiran IV**);

- b. Peserta ujian sertifikasi dapat mengetahui jadwal pelaksanaan ujian sertifikasi melalui aplikasi SIMSERBA atau pemberitahuan dari KPPN selaku UPS tempat pendaftaran;
  - c. KPPN selaku UPS menjadwalkan kegiatan penyegaran yang terintegrasi dengan ujian CBT sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan;
  - d. Tata cara penyegaran, materi diklat dan pelaksanaan ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh KPPN selaku UPS dapat berpedoman pada buku panduan penyelenggaraan ujian sertifikasi bendahara yang diterbitkan oleh Unit Penyelenggara dan manual aplikasi SIMSERBA (**Lampiran V**);
  - e. Narasumber penyegaran dapat ditugaskan kepada TMR pada masing-masing KPPN atau Kanwil DJPb setempat;
  - f. Ujian sertifikasi bendahara dilaksanakan secara *online* sehingga dibutuhkan akses internet maka Kanwil DJPb atau KPPN selaku UPS diharapkan dapat memfasilitasi akses internet jika dimungkinkan atau meminta kepada peserta ujian sertifikasi untuk **membawa laptop** yang terhubung jaringan internet secara mandiri;
  - g. Dalam hal peserta sertifikasi lebih dari 30 peserta maka ujian sertifikasi dapat dilakukan dengan dua gelombang pada hari yang sama;
  - h. Ujian mekanisme IBT ataupun mekanisme CBT terintegrasi dengan penyegaran dapat dilaksanakan ujian secara bersama sesuai jadwal yang telah ditentukan;
  - i. Proses selanjutnya KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Pusat DJPb c.q. DSP terkait dengan pelaksanaan kegiatan sertifikasi dimaksud yang telah diikuti oleh seluruh satker di wilayah kerjanya;
  - j. Kanwil DJPb melakukan koordinasi pelaksanaan sertifikasi bendahara di wilayah kerjanya dan melakukan pemantauan pelaksanaan sertifikasi bendahara di seluruh KPPN selaku UPS di wilayah kerjanya;
  - k. Guna memberikan kemudahan dan panduan terhadap proses pelaksanaan kegiatan penyegaran dan ujian sertifikasi kepada UPS dan peserta sertifikasi telah disusun Buku Panduan UPS, Materi Penyegaran dan Manual Operasional Aplikasi SIMSERBA yang dapat diunduh melalui situs: [www.intra.djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.intra.djpbk.kemenkeu.go.id).
5. Para Kepala Kanwil diminta agar memonitor pelaksanaan surat dimaksud.

Demikian disampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



R.M. Wiwieng Handayaningsih  
NIP 196202161984012001

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.